

RELEVANSI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA

RUSLYHARDY, BERIANTO HAREFA, ALEXSANDER YANDRA, SUDARYANTO

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Lancang Kuning
alexsy@unilak.ac.id

Abstract: *All stakeholder elements must play an active role in realizing a constructive government. From the highest leadership and without exception to institutions such as the General Election Commission. The problem of low community participation is also a serious problem that occurred in the Pekanbaru city regional elections. According to Myron Weimer, political participation is influenced by several things, as quoted by Mohtar Mas'oe'd and Collin MacAndrews (2011: 56-57), namely modernization, changes in social class structure, the influence of intellectuals and the increase in modern mass communication, the existence of conflicts between leaders. -political leaders, increasingly broad government involvement in economic, social and cultural elements. Location of the authority by government officials, namely, the Pekanbaru City General Elections Commission. This research is an activity carried out in the form of analysis which involves presenting data systematically and objectively. Based on the results of the results related to the resilience of the Pekanbaru city public election commission in increasing political participation of beginners, it is still not running optimally.*

Keywords: *Relevance, Election, Participation and Politics.*

Abstrak: Seluruh elemen pemangku kepentingan harus berperan aktif untuk mewujudkan pemerintahan yang bersifat membangun. Dari pimpinan tertinggi dan tidak terkecuali hingga lembaga-lembaga seperti salah satunya Komisi Pemilihan Umum. Masalah rendahnya partisipasi masyarakat juga menjadi suatu masalah serius yang terjadi dalam pemilu kota Pekanbaru. Menurut Myron Weimer partisipasi politik dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti modernisasi, terjadinya perubahan struktur kelas sosial, pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa modern, adanya konflik diantara pemimpin-pemimpin politik, keterlibatan pemerintah yang semakin luas dalam unsur ekonomi, sosial dan budaya. Lokasi penelitian oleh penulis yaitu, Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk analisis yang didalamnya menyajikan data secara sistematis dan objektif. Berdasarkan hasil penelitian yang berkaitan dengan relevansi komisi pemilihan umum kota pekanbaru dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula masih belum berjalan secara maksimal dikarenakan factor modernisasi yang lambat direspon oleh penyelenggara.

Kata Kunci: Relevansi, Pemilu, Partisipasi dan Politik

A. Pendahuluan

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam demokrasi, terutama di kalangan anak muda dan pemilih pemula. Penelitian telah menunjukkan bahwa penggunaan media, terutama media sosial, dikaitkan dengan tingkat kesadaran politik dan keterlibatan sipil yang lebih tinggi di kalangan remaja (Vitak, et all, 2011). Literasi politik memainkan peran penting dalam mempengaruhi partisipasi politik khususnya pemilih pemula, karena memungkinkan mereka untuk secara efektif terlibat dalam politik dan berinteraksi dengan orang lain di ruang politik (Yandra, 2023). Selain itu, pengaruh pesan politik di media baru telah terbukti berdampak pada kesadaran dan partisipasi politik di kalangan generasi milenial (Kholisoh at al, 2029). Hal ini menyoroti pentingnya memahami dampak media sosial dan media baru terhadap partisipasi politik.

Selain itu, peran iklan politik sangat penting dalam menyusun strategi kampanye politik untuk menargetkan pemilih pemula dan pemilih muda, karena iklan politik dapat membantu meningkatkan kesadaran, menghubungkan dengan demografi tertentu, dan pada akhirnya

merangsang partisipasi pemilih dalam kampanye (Rahim et al., 2017). Selain itu, mengintegrasikan pendidikan pemilih ke dalam pendidikan formal telah disarankan sebagai cara untuk meningkatkan literasi dan kesadaran politik di kalangan individu muda, sehingga berpotensi meningkatkan partisipasi mereka dalam proses politik (Amri et al., 2019). Partisipasi politik Kesadaran ini dimulai dari semenjak pemilih muda terdaftar dalam pemilih pada sistem informasi data pemilih (Sidalih) KPU itu sendiri (Yandra, 2023)

Pelaksanaan pemilihan umum oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang meningkatkan partisipasi politik para pemilih. Untuk itu tugas penyelenggara pemilu yaitu KPU diantaranya: Merencanakan, memimpin dan melaksanakan seluruh tahapan kegiatan pemilihan umum, sebagaimana ditentukan dalam undang-undang yang berlaku. Membentuk memberi arahan dan mengkoordinasikan organisasi pelaksanaan pemilihan umum ditingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta panitia pemilihan luar negeri (PPLN). Menyusun dan menetapkan tata cara serta tata laksana pemilihan umum sebagai penjabaran teknis peraturan undang-undang. Merencanakan, memimpin dan menyelenggarakan pengadaan dan pendistribusian logistik pelaksanaan pemilihan umum. Mengumpulkan, mensistematisasi, mengelola dan publikasikan bahan serta data hasil pemilihan umum.

Penting juga untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhi kemandirian politik, pengetahuan politik, dan partisipasi politik di kalangan pemilih muda, karena dimensi-dimensi ini memainkan peran penting dalam membentuk keterlibatan mereka di ranah politik (Dankwah & Mensah, 2021). Selain itu, memahami perubahan tren partisipasi politik di kalangan pemilih muda, terutama dalam konteks transisi demokrasi, sangat penting untuk memahami pola keterlibatan politik yang terus berkembang (Rasul, 2021).

Literatur menekankan pentingnya penggunaan media, literasi politik, pesan media baru, iklan politik, dan pendidikan formal dalam mempengaruhi partisipasi politik pemilih muda dan pemilih pemula. Faktor-faktor ini memainkan peran penting dalam membentuk kesadaran, kemandirian, dan keterlibatan individu dalam proses demokrasi, menyoroti perlunya strategi yang ditargetkan untuk meningkatkan partisipasi politik demografi ini.

Tercatat sebagai kota metropolitan, Kota Pekanbaru menjadi penting adanya perhatian pemerintah yang lebih spesifik untuk arah pembangunan yang dicita-citakan. Seluruh elemen pemangku kepentingan harus berperan aktif untuk mewujudkan pemerintahan yang bersifat membangun. Dari pimpinan tertinggi dan tidak terkecuali hingga ke lembaga-lembaga seperti salah satunya Komisi Pemilihan Umum. Masalah rendahnya partisipasi masyarakat juga menjadi suatu masalah serius yang terjadi dalam pilkada Kota Pekanbaru. Untuk menjelaskan masalah partisipasi ini akan dipaparkan dengan data berikut:

Tabel 1. Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Pekanbaru Dalam Pesta Demokrasi

No	Tahun	Pemilih Terdaftar	Memilih	Tidak Memilih
1	2014	666.204 (Pilpres)	392.917 (58,97)	273.287 (41,03)
		651.204 (Pileg)	378.531 (58,12)	272.673 (41,88)
2	2017	568.744 (pilwalkot)	295.402 (51,93)	273.342 (48,07)
3	2018	497.880 (Pilgub)	301.944 (60,64)	195.936 (39,36)
4	2019	611.093 (Pilpres)	482.116 (78,89)	128.977 (21,11)
		507.213 (Pileg)	476.992 (94,04)	30.291 (5,96)
5	2024	771.497		

Sumber : KPU Kota Pekanbaru

Data hasil pemilu yang bisa kita telaah seperti pada pelaksanaan pemilu terakhir. Pemilu pilpres 2019 dapat kita lihat sebagai berikut:

Tabel 2. Data Pemilih Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kota Pekanbaru

No	Kecamatan	Jumlah Pemilih	Memilih
1	Sukajadi	29.006	23.425
2	Pekanbaru Kota	15.939	12.581

3	Sail	15.396	11.489
4	Lima Puluh	27.665	21.383
5	Senapelan	23.646	19.368
6	Rumbai	46.147	36.327
7	Bukit Raya	62.431	48.328
8	Tampan	110.543	86.574
9	Marpoyan Damai	77.895	62.830
10	Tenayan Raya	93.323	73.638
11	Payung Sekaki	55.758	46.177
12	Rumbai Pesisir	53.349	39.996
Total		611.093	482.116

Sumber : KPU Kota Pekanbaru

Penyebab para pemilih tidak menggunakan hak pilihnya dikarenakan beberapa faktor seperti: telah apatisnya para pemilih terhadap yang mencalonkan diri untuk menjabat, upaya yang ditempuh pihak penyelenggara pemilu itu sendiri, merasa jenuh dengan pemilu yang kesannya begitu-begitu saja, adanya masyarakat yang tidak terdaftar pada DPT sesuai wilayah masing-masing, kesadaran akan politik sangat rendah, kurangnya dorongan terhadap masyarakat dan faktor penyebab lainnya. Sementara peningkatan pemilih kota Pekanbaru sebagai berikut:

Tabel 3. Angka Peningkatan Pemilih Kota Pekanbaru

No	Tahun	DPT	Pemilih Pemula	Persentasae
1	2014	651.204	29.674	4,55%
2	2017	568.744	82.460	14,49%
3	2018	497.880	70.864	14,23%
4	2019	507.213	9.333	1,84%
5	2024	771.497	82.392	10,67%

Sumber : KPU Kota Pekanbaru

Berbagai faktor kendala yang peneliti temukan di lapangan, sudah menjadi acuan untuk menemukan solusi dari kendala tersebut. Faktor inilah yang kemudian dialami oleh peneliti untuk diangkat sebagai suatu pertanyaan yang jawabannya penting sebagai hasil kajian. Sebagai salah satu lembaga penting dalam Negara, Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru maka beberapa fenomena atau permasalahan yang harus ditempuh dalam penyelenggaraan pemilu terkhusus pemilih pemula yaitu:

- Pertama upaya sosialisasi, sosialisasi kepada masyarakat terlebih kalangan pemilih pemula masih belum terinteraksi secara maksimal, sehingga menimbulkan persepsi menganggap kurang penting bahkan tidak peduli terhadap penggunaan hak suara.
- Masalah berikutnya ialah akurasi data, data pemilu yang masih belum terkontrol valid seperti tidak terdaftar di DPT, tidak memenuhi syarat dan perubahan data lainnya seperti perpindahan domisili. Tidak bisa terkontrolnya data tersebut bisa disebabkan karena perubahan tempat pekerjaan, tugas, keluarga, pendidikan dan hal lainnya.
- Selanjutnya terkait tingkat pemahaman dan kesadaran, kurangnya edukasi dan informasi politik masyarakat terkhusus pemilih pemula masih rendah. Sehingga akibatnya kurangnya antusias dan masih tergolong labil dalam mengambil keputusan. Akibatnya menjadi target empuk dan rawan pihak yang punya kepentingan politik.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk analisis kualitatif yang didalamnya menyajikan data secara sistematis dan objektif. Kegiatan penelitian yang diangkat ini dilakukan dengan mengumpulkan banyak data dan mengolahnya untuk memecahkan suatu masalah atau menguji suatu kajian. Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian yang dimaksud merupakan pola penelitian yang memanfaatkan data kualitatif yang dijabarkan secara deskriptif. Dari data

tersebut nantinya yang akan digunakan dalam menganalisis fenomena secara sosial. Informan merupakan orang yang memberi dan dimintai informasi atas suatu objek yang sudah dipahami oleh informan tersebut. Seorang informan akan memberi informasi atau pernyataan atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penanya atau peneliti. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini nantinya yang akan dijadikan acuan data faktual dan aktual oleh peneliti untuk mengerucutkan suatu target analisis keberhasilan yang telah ditentukan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Ketua KPU Pekanbaru, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kota Pekanbaru, Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Pekanbaru, Anggota Partai Politik (DPD Partai NASDEM Kota Pekanbaru), Masyarakat Kota Pekanbaru (pemilih pemula). Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data melalui pengelompokan yang dimaksud dalam hal ini yaitu, baik yang akan ditampilkan dalam bentuk tabel maupun yang akan dipresentasikan. Pada penelitian yang berlandas dengan analisis melalui deskriptif ini menyajikan gambaran secara umum tentang objek yang diteliti yang disertai dengan paparan dan penjelasan berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan.

C. Hasil dan Pembahasan

Adanya Kegiatan (Bukan Sikap dan Kepercayaan)

Adanya kegiatan merupakan suatu bukti nyata yang dalam bentuk aktivitas. Hal ini juga diketahui bahwa tidak hanya sebatas opini atau argumen yang diyakini. Namun dalam hal ini dijelaskan bahwa adanya proses, usaha atau pekerjaan yang benar secara fakta memberi makna kegiatan tersebut. Pernyataan ini memberi bukti bahwa, sesuatu tidak cukup kalau hanya dari kata-kata semata, namun lebih jelasnya disertai dengan tindakan yang memberi perubahan.

Seperti halnya diperoleh dari hasil penelitian, *“kita dari lembaga KPU kota Pekanbaru melaksanakan tahapan pemilu secara tertata dan teratur. Langkah dilakukan pun sudah ada tahapan dan konsep yang memang dijalankan sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan wewenang. Bahkan kita juga turun ke lapangan di tengah-tengah masyarakat untuk menyampaikan penyuluhan atau sosialisasi. Tidak hanya itu, KPU pun turun menyampaikan betapa pentingnya penggunaan hak suara pada pesta demokrasi”*Demikian dikatakan **Anton Merciyanto, Ketua KPU Kota Pekanbaru.**

Berdasarkan hasil wawancara pada poin diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa, terlaksananya kegiatan ada banyak faktor yang tentunya penting untuk dilalui lebuah awal. Kegiatan bisa terlaksana apabila disertai dengan tahap awal yaitu proses sosialisasi. Sosialisasi yang dimaksud harus selaras dengan tahap dan konsep fokus KPU. Selanjutnya mengarah pada target yang akan dituju oleh KPU untuk menyalurkan pemahaman tentang pemilu. Pada tahap ini pun memberi makna yang sangat bermanfaat seperti pada penyampaian pendidikan pemilu dan yang terlebih penting ialah adanya pembekalan pada usia dini, sebagai regenerasi dalam cetusan demokrasi-demokrasi emas dimasa mendatang. Pernyataan menarik yang tidak kalah penting ialah, adanya kegiatan yang bukan sikap, maka harus melalui partisipasi langsung atau keterlibatan dalam berpartisipasi yang dilakukan oleh warga negara yang memenuhi hak kepemilikan suara.

Memiliki Tujuan Mempengaruhi Kebijakan Pemerintah

Mempengaruhi merupakan suatu bentuk tindakan mengajak dan bersifat menularkan suatu keadaan. Dengan kata lain, mempengaruhi juga memberi makna keselarasan terhadap suatu hal. Kerap hal ini terjadi dibandingkan antara suatu keadaan yang sudah ada dengan suatu keadaan yang akan ada. Jika lebih dirinci lagi, adanya perubahan yang terjadi dalam masyarakat jika dibandingkan dengan target yang telah berlalu dan target yang akan dihadapi. Tujuan ini tidak semata-mata hanya sebatas kebijakan yang biasa-biasa saja, namun ini sangat dinamis dan perlu penyesuaian kebijakan.

Tabel 4. Jenis Media Sosial Yang Diterapkan Dalam Melaksanakan Sosialisasi Kepada Masyarakat

No	Jenis Sosialisasi	Tinggi	Sedang	Rendah
1	Media Elektronik	TV Lokal	TV Nasional	Radio
2	Media Cetak	Koran	Majalah	Tabloid
3	Media Sosial	Instagram	Tik Tok	Youtube

KPU terus menciptakan inovasi dan kreativitas dalam menyalurkan informasi pemilu kepada masyarakat luas. Menjalin kerjasama dengan banyak pihak guna mempercepat dan lebih efisien kelangsungan tugas pokok dan fungsi. Hal ini sudah menjadi tanggungjawab dan wewenang KPU, sekalipun banyak tantangan yang ditemui dilapangan. Tidak hanya itu, dari pihak anggota salah satu partai juga menyatakan bahwa, pentingnya kekuasaan dalam politik atau pemerintah, sebab sangat besar pengaruhnya dengan implementasi kekuatan penyaluran aspirasi rakyat. Jenjang pemilih pemula juga mulai menyadari dan memahami bahwa, pimpinan pada negara lebih diperhatikan kebijakannya atas dasar kekuasaan dan kewenangan.

Dari tabel diatas, masih rendahnya sosialisasi menggunakan radio, tabloid dan youtube. Padahal dizaman saat ini, penggunaan radio dan tabloid masih dibutuhkan. Begitu pula dengan youtube harus lebih digunakan lagi karena segera informasi mengalir dari media tersebut.

Warga Negara Sebagai Pelaku

Warga negara merupakan penduduk sebuah negara atau bangsa yang menetap dan dijamin oleh Undang-Undang. Warga negara berhak memperoleh kelangsungan hidup yang layak oleh pemerintah dan dijamin berkedudukan setara di mata hukum. Sebagai warga negara juga tentunya berhak untuk ikut terlibat dalam demokrasi. Ini memberi ruang yang sebebas-bebasnya kepada warga negara untuk turut ambil bagian dalam partisipasi masyarakat. Berikut ini dijelaskan bentuk keterlibatan warga negara sebagai pelaku dalam pesta demokrasi disertai dengan beberapa contoh keterlibatan warga negara sebagai berikut.

Tabel 5. Warga Negara Sebagai Pelaku Demokrasi

No	Jenis Partisipasi	Contoh Partisipasi
1	Partisipasi Konvensional	A. Pemberian suara (voting)
		B. Diskusi politik
		C. Kegiatan kampanye
		D. Kelompok kepentingan
		E. Komunikasi dengan pejabat
2	Partisipasi Non Konvensional	F. Pengajuan petisi
		G. Demonstrasi
		H. Konfrontasi
		I. Mogok
		J. Tindakan kekerasan politik
		K. Perang gerilya

Demokrasi itu sepenuhnya dikendalikan oleh rakyat. Hal ini terbukti pada keterlibatan rakyat, baik sebagai pemilih dan juga sebagai yang dipilih. Semuanya itu ialah berasal dari elemen rakyat. Tentunya memberi implementasi bahwa demokrasi itu sifatnya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Kesempatan yang sama terjadi didalamnya. Sebagai masyarakat kita diberi waktu untuk menilai dan mengambil sisi positifnya betapa pentingnya dan seberapa besar pengaruhnya politik dalam roda pemerintahan yang diterapkan saat ini di Indonesia.

Modernisasi

Modernisasi merupakan terjadinya perubahan dalam masyarakat secara multidimensional di bidang sistem sosial, ekonomi, politik dan budaya dengan pemanfaatan teknologi dan komunikasi untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Hal ini lebih merujuk pada sebuah bentuk transformasi dari keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang ke

arah yang lebih baik dengan harapan akan tercapai kehidupan masyarakat yang lebih maju, berkembang dan makmur.

Perubahan dalam masyarakat mempengaruhi setiap elemen yang ada didalamnya. Menumbuh rasa memiliki yang tinggi dan membangun inovasi tentang pentingnya perubahan dan menanggulangi dinamika, tentunya ini akan semakin mendukung proses modernisasi dan hidup dalam kemajuan global. Politik memang bukan segalanya, namun segala kebijakan yang dibuat dan diterapkan dalam negara akan ditentukan oleh pemerintah, yang dimana kita sebagai negara berdaulat memang harus menjunjung hal ini.

Perubahan Struktur Kelas Sosial

Pada hakekatnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Oleh sebabnya manusia selalu hidup dalam kondisi keterkaitan sosial baik secara batin dan emosi yang menjalin hubungan saling menguntungkan dan saling mempengaruhi. Perubahan sosial juga sering terjadi dalam setiap kalangan dan jenjang masyarakat, dimana suatu keadaan akan mengalami pasang surut dalam elemen masyarakat. Dijelaskan bahwa perubahan struktur kelas sosial merupakan transformasi dalam lingkup posisi lapisan masyarakat, baik secara pendidikan, swasta, dan tingkatan sosial dari unsur lainnya. Disisi lain juga dijelaskan bahwa memang perubahan sosial terjadi karena adanya pergantian masa dan musim yang tentunya suatu keadaan akan mengalami adaptasi terhadap suatu keadaan yang baru. Dengan adanya perubahan baru, bukan berarti kebiasaan-kebiasaan lama akan ditinggalkan begitu saja, namun ini akan memberi pedoman dan gambaran guna dievaluasi kembali.

Tidak selamanya kelas sosial itu akan monoton disatu masa. Kelas sosial atau struktur sosial bisa saja berubah dengan banyak fenomena yang muncul baik dari dalam masyarakat maupun dari luar masyarakat itu sendiri. Perubahan ini memberi peluang kepada KPU untuk menyampaikan bahwa penggunaan hak suara dan menjadi calon mewakili aspirasi masyarakat penting untuk diperhatikan. Dari salah satu partai juga menyatakan bahwa, perubahan tidak mesti disesali dan kemudian menjadi persoalan serius dalam masyarakat, namun inilah yang menjadi acuan dimana banyak orang berhasrat memperoleh kesempatan wewenang dan hak dalam menjalankan tugas dan mandat dari rakyat. Sebagai pemilih pemula pun turut menyuarakan bahwa, para kandidat biasanya berasal dari kalangan yang berkeadaan secara materi. Secara tidak langsung hal ini sudah membuktikan adanya perbedaan dari sisi sosial atau struktur sosial.

Pengaruh Kaum Intelektual

Kaum intelektual merupakan jajaran terdidik yang akan menjadi regenerasi penerus suatu tanggungjawab. Biasanya mereka berasal dari golongan yang masih berada pada jenjang pendidikan. Sekalipun mereka tidak terlalu ditonjolkan untuk turut serta mengambil bagian dalam berpartisipasi menentukan dan menetapkan kebijakan, akan tetapi mereka selalu diperhatikan dan dibimbing untuk menjadi lebih baik. Mungkin saat ini mereka hanya sebian minoritas dari segi kesempatan berpengaruh, namun ada titik dimana mereka akan didengar dan mulai tidak diragukan lagi. Biasanya golongan ini juga memiliki ide yang cemerlang dan kritis, bahkan memiliki keberanian untuk mulai mencetuskan aspirasi mereka, ketiak mereka tidak diindahkan oleh pemerintah. Hal ini mereka lakukan bukan semata-mata untuk mencari perhatian masyarakat, namun ini juga dilakukan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.

Calon atau kandidat para pesta demokrasi tersebut ialah semuanya berasal dari kalangan sudah terdidik. Memeiliki pengalaman secara akademik dan pengalaman secara teori yang sudah mumpuni sebelumnya. Tentunya mereka juga menjalani beberapa proses yang memang kemudian mereka dinyatakan layak dan pantas untuk melaju ke babak selanjutnya dan membawa aspirasi rakyat dengan kesempatan yang telah dipercayakan. Politik tidak hanya ajang dimana orang banyak untuk bermain-main dan melakukan formalitas, tetapi ini tentang kemampuan menjembatani visi misi dan mencetuskan sebuah perubahan yang berarti bagi masyarakat luas.

Pemilu dalam politik juga bukan hanya sebatas menunjukkan pesta demokrasi yang buruk. Akan tetapi dari sini ternilai bahwa negara melakukan keadilan didalamnya yang mencerminkan hasil pemilu emas untuk menuju Indonesia emas. Ini bukan tentang apa yang bisa kita peroleh, tetapi ini tentang apa yang bisa kita berikan kepada bangsa. Mengabdikan kepada bangsa maka haruslah dimulai dengan jalur terdidik yang menciptakan akademisi yang mahir dan handal serta berintelektual tanpa mengesampingkan integritas.

Adanya Konflik Antara Pemimpin Politik

Konflik merupakan ketidakcocokan antar dua pihak atau lebih, yang menimbulkan bentrokan atau permasalahan. Konflik kerap kali menjadi titik awal api pemisah dan menghancurkan suatu keadaan. Jika dibiarkan berlarut-larut dan semakin saling mempertahankan ego, maka akibatnya ialah persoalan yang semakin besar dan melahirkan kerugian baik secara materi maupun secara kebijakan. Biasanya yang menjadi korbannya ialah masyarakat luas, jika kita kaji lebih dalam di elemen masyarakat. Karena perlu diketahui bahwa ada beberapa bentuk konflik yaitu seperti, konflik politik, konflik sosial dan bahkan konflik pribadi.

Konflik serius antar partai sebenarnya tidak ada yang memang memberi persoalan serius. Hal ini dapat dinilai bahwa, masyarakat luas yang memang selalu menghiperbolakan atau membesar-besarkan suatu masalah. Misalnya saja kita akan mendapat golongan yang menyebut bahwa ada koalisi ada golongan oposisi. Adanya golongan-golongan ini yang kemudian menyerang dan menimbulkan dinamika emosional kepada masyarakat. Padahal sementara masyarakat sendiri yang menciptakan persepsi ini. Dengan demikian yang menjadi akibatnya ialah masyarakat susah menelaah dan menyikapi bagaimana menentukan pilihan pada saat pelaksanaan pesta demokrasi. Sehingga konflik yang dimaksud pun akan dapat terselesaikan setelah berlalunya masa pelaksanaan pemilu.

Keterlibatan Pemerintah Dalam Unsur Ekonomi, Sosial dan Budaya

Ekonomi, sosial dan budaya ialah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam keberlangsungan kehidupan manusia. Kehidupan individu dipengaruhi oleh tempat dimana individu tersebut berada yang kemudian memiliki kebiasaan tersendiri. Kebiasaan atau kultur inilah yang sulit dilepas dan diubah dengan sentuhan global. Namun sebagai bangsa yang membuka diri untuk menerima setiap proses pergerakan perubahan yang lebih baik, maka akan terjadi yang namanya penyesuaian terhadap input maupun output dalam suatu bangsa tersebut. Masyarakat memang harus berusaha sendiri untuk mempertahankan hidup, namun perlu juga kita sadari bahwa peran pemerintah untuk memberi pelayanan dan kehidupan yang layak kepada setiap warga negara ialah sudah menjadi tanggungjawabnya. Contoh hal kecil saja ketika pemerintah berinisiatif memberi modal awal kepada masyarakat untuk usaha mikro. Tindakan ini sudah menjadi salah satu poin penting bagi pemerintah untuk membantu para pengusaha kelas bawah.

Tindakan pemerintah dalam bentuk lain juga bisa kita lihat dengan pemberian sembako. Hal ini memang benar sangat membantu para masyarakat yang membutuhkan, ada juga resikonya. Resikonya ialah, sembako tersebut bisa saja habis dalam kurun waktu tertentu. inilah alasan mengapa pemerintah lebih baik memberi modal kepada masyarakat yang membutuhkan, untuk menghilangkan ketergantungan kebutuhan dari pemerintah, melainkan menjalankan usaha sendiri, dengan banyak belajar manajemen usahanya secara berkelanjutan.

Keberadaan pemerintah dalam suatu negara atau suatu daerah tentunya bersikap sebagai pengarah dan menakhodai seluruh masyarakat. Ketimpangan-ketimpangan yang sudah terjadi dan yang akan terjadi didalamnya, sudah menjadi tanggungjawab pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi seluruh yang mencakup ruang lingkup kehidupan masyarakat. Mempertahankan kokohnya budaya tercermin ketika menerima banyak pengaruh luar yang membawa perubahan. Tugas pemerintah ialah melestarikan yang ada dan memupuk yang akan

ada. Sosial masyarakat dikendalikan dengan baik, terlebih ekonomi masyarakat perlu dipandang lebih guna pemeratakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang berkaitan dengan relevansi komisi pemilihan umum kota pekanbaru dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula masih belum berjalan secara maksimal. Hal ini disebabkan yang membuat pemilih pemula kurang dalam partisipasi politik dan berbagai faktor lainnya. Faktor Penghambat Relevansi Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula. Sosialisasi yang masih kurang efektif kepada masyarakat menjadi salah satu kendala kurangnya partisipasi pada pemilu. Sementara itu beberapa faktor lain seperti akurasi data yang masih terbilang belum terbenahi secara data, baik yang disebabkan oleh domisili, dan penetapan tugas pada pekerjaan. Bahkan faktor lain yang terjadi ialah kurangnya perhatian masyarakat dalam menyikapi betapa pentingnya pemilu, bisa karena tidak ada calon yang didambakan, bahkan pengalaman pemilu sebelumnya yang hanya mendengar janji politik para calon dan juga berfikir apatis dalam jenjang politik.

Daftar Pustaka

- Ansori, Z. (2019). Pendidikan Pemilih sebagai Metode Meningkatkan Partisipasi dan Keterampilan Pemilih Pemula Menggunakan Hak Pilihnya dalam Pemilu. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 1(1), 49–62. <https://doi.org/10.20414/politea.v1i1.812>
- Azirah. (2019). Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pesta Demokrasi. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 6(2), 86–100. <https://doi.org/10.32505/politica.v6i2.273>
- Budiardjo, M. (1998). *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Dani, Karim. 2006. *Sistem Politik dan Pemilu di Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Dankwah, J. B. and Mensah, K. (2021). Political marketing and social media influence on young voters in ghana. *SN Social Sciences*, 1(6). <https://doi.org/10.1007/s43545>.
- Kurniawati, n. (2015). hakekat ilmu pemerintahan. *cosmogov*:205-215.
- Kholisoh, N., Yuliawati, E., Suci, N. R., & Suharman, T. (2019). The influence of political messages in new media to political awareness and its impact on the political participation of millennial generation. *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 4(2), 128-139. <https://doi.org/10.25008/jkiski.v4i2.333>
- Manik, Kamil Husni dkk. 2014. *Partisipasi Pemilih dalam Pemilu 2014*. Jakarta
- Marijan, Kacung. 2010. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Padang, A. T., & Megawati. (2018). Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Peran Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula. 2(September 2020), 522–532.
- Rachmat. 2014. *Manajemen Strategik*. Bandung : Pustaka Setia
- Rahim, M. H. A., Lyndon, N., & Mohamed, N. S. P. (2017). Transforming political advertising in malaysia: strategizing political advertisements towards first-time and young voters in malaysian ge 14. *Jurnal Komunikasi, Malaysian Journal of Communication*, 33(1), 356-367. <https://doi.org/10.17576/jkmjc-2017-3301-23>
- Sakinah, M. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Politik Sebagai Implementasi Demokrasi. <https://osf.io/preprints/hra7t/%0Ahttps://osf.io/hra7t/download>
- Wardhani, P. S. N. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57–62.
- Yuliati, R. (2017). Penggunaan Internet Terhadap Peningkatan Partisipasi Politik Dan Kehidupan Demokrasi. *Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 2(02). <https://doi.org/10.30813/bricolage.v2i02.840>
- Yusnedi, & Utami, S. (2019). *Buku Ajar Sosiologi Politik Seri: Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia*. In Books.Google.Co.Id.

- <https://books.google.co.id/books?id=8bPODwAAQBAJ&pg=PA2&dq=pengertian+pemilu&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwiirr->
- Yandra, A., Sudaryanto, S., Sintiya, B., Arizal, A., & Rianita, D. (2023). Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih oleh KPU Provinsi Riau Jelang Pemilu 2024. *JDP (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, 6(2), 164-179.
- Yandra, A., Faridhi, A., Andrizal, A., Ferizko, A., & Puteri, T. I. M. (2023). Understanding the Voter Data Information System (SIDALIH): The Need for Sustainable Voter Data Accuracy (DPB) Ahead of the 2024 General Election. *KnE Social Sciences*, 385-399.
- Muhadam Labolo|Teguh Ilham, "Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, Teori, Kosep dan Isu Strategis", Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2015, hlm., 51.
- Primandha Sukma Nur Wardhani, "Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum" Jurnal pendidikan ilmu-ilmu sosial Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia, 2018, hlm, 58.
- Prayugo, N. P. 2020. Strategi KPU Provinsi untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur riau tahun 2018.
- Vitak, J., Zube, P., Smock, A., Carr, C. T., Ellison, N. B., & Lampe, C. (2011). It's complicated: facebook users' political participation in the 2008 election. *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, 14(3), 107-114. <https://doi.org/10.1089/cyber.2009.0226>